



**BUPATI BARITO UTARA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

4

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten  
Barito Utara Tahun 2015 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun  
Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 4.799.117.652,- terdiri atas:

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 505.597.652,-
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 4.293.520.000,-

**Pasal 2**

Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 505.597.652,- terdiri atas:

1. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala  
Daerah sebesar Rp. 185.830.212,-
2. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
sebesar Rp. 319.767.440,-

**Pasal 3**

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar  
Rp. 185.830.212,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci sebagai  
berikut :

a) Gaji Pokok/Uang Representasi	Rp. 50.700.000,-
b) Tunjangan Keluarga	Rp. 11.960.000,-
c) Tunjangan Jabatan	Rp. 106.099.500,-
d) Tunjangan Beras	Rp. 6.590.220,-
e) Tunjangan pph/Tunjangan Khusus	Rp. 8.956.246,-
f) Pembulatan Gaji	Rp. 1.524.246,-
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>Rp. 185.830.212,-</b>

**Pasal 4**

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi  
Pendapatan Asli Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  
109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi  
sebesar 3%,

- b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 % ;
- c. di atas 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
- d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 % ; dan
- f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15 %.

#### Pasal 5

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp.319.767.440,- (0.80% dari PAD Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 39.970.930.000,- ) diatur sebagai berikut:

1. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran Rp.319.767.440,- atau sebesar Rp.191.860.464,-
2. Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp.319.767.440,- atau sebesar Rp. 127.906.976,-

#### Pasal 6

Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.293.520.000,- yang diatur sebagai berikut :

1. Besarnya Belanja Langsung Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 2.857.000.000,- yang dirinci sbb:
 

a) Belanja Pegawai	Rp.	0,-
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	2.857.000.000,-
c) Belanja Modal	Rp.	0,-
2. Besarnya Belanja Langsung Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1.436.520.000,- yang dirinci sbb:
 

a) Belanja Pegawai	Rp.	0,-
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.436.520.000,-
c) Belanja Modal	Rp.	0,-



## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.

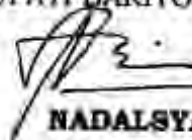
## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal, Januari 2016

BUPATI BARITO UTARA,


  
NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal, Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

  
JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 11  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FAKHRI FAUZI  
NIP.19710921 199803 1 004

DAG BERANGKAT	
SEKDA	
ASISTEN SEKDA	
BAG	
SEKUR	
WAKUR	

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN SEKDA	
BAG	
SEKUR	
WAKUR	